

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

Edhy, Djaka Saranta S. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: STAN.

Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Cetakan ke-12. Flores: Nusa Indah.

Martani, Dwi, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Undang-undang

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 133. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2008. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 70. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 2002. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 110. Sekretariat Negara. Jakarta.

_____. 1995. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara RI Tahun 1995, No. 64. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan-peraturan

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 346. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Obligasi. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 259. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 48. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 52. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2008. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.

_____. 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Berita Negara RI Tahun 2011, No. 391. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2001. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

_____. 1997. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.

_____. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 73. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 50. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.

_____. 2003. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-147/PJ/2003 tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh KIK-EBA dan Para Investornya.

Peraturan Daerah

Provinsi Riau. 2013. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau. Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013. Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Pekanbaru.

Internet

<http://www.jamkridariau.com/> (diakses tanggal 10 April 2016)